

KEBIJAKAN PUBLIK BERNAMA UJIAN NASIONAL

Kebijakan publik merupakan segala macam keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Kebutuhan tersebut juga terus berkembang sesuai dengan tingkat pendidikan dan teknologi. Tentu saja setiap kebijakan yang akan diterapkan haruslah memiliki tujuan yang jelas. Dye (1997:2) dalam *Understanding Public Policy* menyatakan : *public policy is whatever governments choose to do or not to do*. Sementara itu kebijakan publik itu juga harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Kebijakan publik sebagai hasil pelaksanaan fungsi politik pemerintah, merupakan alat pemerintah untuk menguasai dan mengendalikan kegiatan-kegiatan sosial secara rasional. Ia merupakan arahan yang sifatnya otoritatif dari pemerintah yang dioperasionalkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, strategi, perencanaan, berbagai intervensi pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan lainlain tindakan pemerintah yang sifatnya fundamental. Kebijakan publik biasanya sebagai *output* dari suatu sistem pemerintahan.

Sebagai suatu otoritas, berbagai kebijakan publik telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Ujian Nasional. Ujian ini selanjutnya dipergunakan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional, sebagai tolok ukur kelulusan siswa baik SLTP maupun SLTA. Materi yang diujikan ada tiga yakni: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Ketiga mata pelajaran ini sangat menentukan masa depan siswa Indonesia sekarang ini. Ketiga mata pelajaran ini juga yang kemudian menjadikan berbagai kehebohan di Republik tercinta ini. Ujian Nasional telab "memakan korban".

Berbagai kejadian sejak diurnkannya hasil ujian nasional tingkat SLTA tanggal 19 Juni 2006 lalu, di antaranya seorang anak bunuh diri, di Bekasi murid yang tidak lulus membakar sekolahnya. Sementara tentunya berbagai protes baik dari anak-anak yang tidak lulus, para orang tua, guru, kepala sekolah dan anggota DPR serta berbagai elemen LSM beririsan. Berbagai hujatan dialamatkan kepada pemerintah yang dalam hal ini tentunya Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), yang dituding sebagai biang keladi dari semua kekacauan ini.

Para orang tua dan guru dari anak-anak yang tidak lulus memprotes karena mereka merupakan anak-anak yang baik sekaligus pintar di sekolahnya. Sayangnya anak-anak tersebut ternyata hanya tidak memenuhi syarat untuk satu mata pelajaran, sementara dua mata pelajaran lainnya lulus dengan nilai di atas 8. Malahan di antara mereka ada yang telah diterima di perguruan tinggi, dengan berbagai jalur penerimaan. Hal ini tentunya sangat mengecewakan mereka. Mendiknas selanjutnya memberikan jalan keluar bagi mereka yang tidak lulus untuk mengikuti ujian persamaan melalui Kejar Paket C. Ujian ini diselenggarakan untuk membantu mereka apabila ingin segera mengikuti ujian agar dapat lulus pada tahun ini juga, setelah diadakan ujian ulangan seperti tahun sebelumnya.

Kontan saja jalan keluar tersebut disambut cemoohan dari semua kalangan (para murid yang tidak lulus, pihak sekolah dan LSM). Menurut mereka, buat apa susah-susah sekolah di tempat mereka sekarang (apalagi sekolah favorit) jika keluar harus mengantongi ijazah persamaan? Sama sekali tidak ada kebanggaan yang dapat mereka sandang. Apalagi kemudian keluar pernyataan Wapres Jusuf Kalla, yang mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan ujian ulangan. Ketidakkulusan merupakan resiko seseorang yang mengikuti ujian.

Pernyataan tidak simpatik Wapres ini juga langsung menuai protes. Wapres dianggap tidak tahu tentang permasalahan pendidikan dan juga dianggap memperkeruh suasana. Kemudian keadaan ini juga diperparah dengan adanya pengumuman kelulusan tingkat SUP, dengan situasi yang kurang lebih sama dengan pengumuman kelulusan SLTA.

Peristiwa ini selanjutnya mengundang Komnas Perlinclungan anak turun tangan untuk membantu memperjuangkan anak-anak yang tidak lulus tersebut. Mereka berbicara di DPR mempertanyakan kebijakan mengapa hanya tiga mata pelajaran itu yang dipergunakan untuk menentukan kelulusan seorang murid. Mereka juga menganggap bahwa tidak seharusnya Mendiknas meniadakan ujian ulangan, apalagi dana untuk kegiatan tersebut sudah dianggarkan.

Persoalan ini sampai sekarang memang terlihat belum akan tuntas, karena bukan tidak mungkin tahun depan kejadian yang sama akan kembali terulang. Pertanyaan, kita sekarang, apakah Ujian Nasional ini dianggap sebagai kegagalan kebijakan publik dalam implementasinya? Apakah mungkin kebijakan proses implementasinya yang cacat atau tidak didukung oleh faktor-faktor yang disyaratkan dalam kebijakannya sendiri?

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh suasana politik dan kondisi yang bertaku saat ini dan prediksi ke depan serta antisipasinya. Seperti LAN dalam SANKRI (2003:15) menyatakan bahwa ketepatan pelaksanaan kebijakan selain dipengaruhi oleh ketepatan dalam pemilihan kebijakan, juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti konsistensi dan efektivitas pelaksanaan serta ada tidaknya perkembangan di luar perkiraan.

Mungkinkah Ujian nasional, tahun depan akan berubah, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan keadaan? Kita tunggu saja (Dayat Hidayat)